

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2026

BALAI RISET
PERIKANAN
BUDIDAYA
AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN
PERIKANAN



Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) selama Tahun 2026 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kegiatan serta kinerja BRPBATPP selama Triwulan I Tahun 2026 sebagai organisasi di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan, selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pencapaian kinerja untuk kedepannya.



Bogor, 21 April 2026

Pada BRPBATPP

Raden Roro Sri Pudji Sinarni Dewi, S.Pi, M.Si
NIP. 19751216 200312 2 002

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2.TUJUAN	2
1.3.TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4.KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA	5
1.5.SISTEMATIKA PELAPORAN	13
1.6.POTENSI DAN PERMASALAHAN	14
BAB II. PELAKSANAAN.....	21
2.1.RENCANA STRATEGIS.....	21
2.2.RENCANA KERJA TAHUNAN	29
2.3.PERJANJIAN KINERJA	29
2.4.PENGUKURAN KINERJA	31
BAB III. HASIL PELAKSANAAN	33
3.1.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	33
3.2.EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	33
3.3.AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	76
3.4.EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA	80
BAB IV. PENUTUP	85
4.1.CAPAIAN KINERJA	85
4.2.PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	87
LAMPIRAN.....	89

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	vii
Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja	6
Tabel 3. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	6
Tabel 4. Aset BRPBATPP s/d Akhir Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 5. Anggaran BRPBATPP Tahun 2021-2025	18
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2020-2025	23
Tabel 7. Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026	29
Tabel 8. Perjanjian Kinerja antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026	30
Tabel 9. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	34
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja 1 Triwulan I Tahun 2026	37
Tabel 11. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	40
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 2 Triwulan I Tahun 2026	41
Tabel 13. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	44
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 3 Triwulan I Tahun 2026	45
Tabel 15. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	47
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 4 Triwulan I Tahun 2026	48
Tabel 17. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	50
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 5 Triwulan I Tahun 2026	51
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja 6 Triwulan I Tahun 2026	53

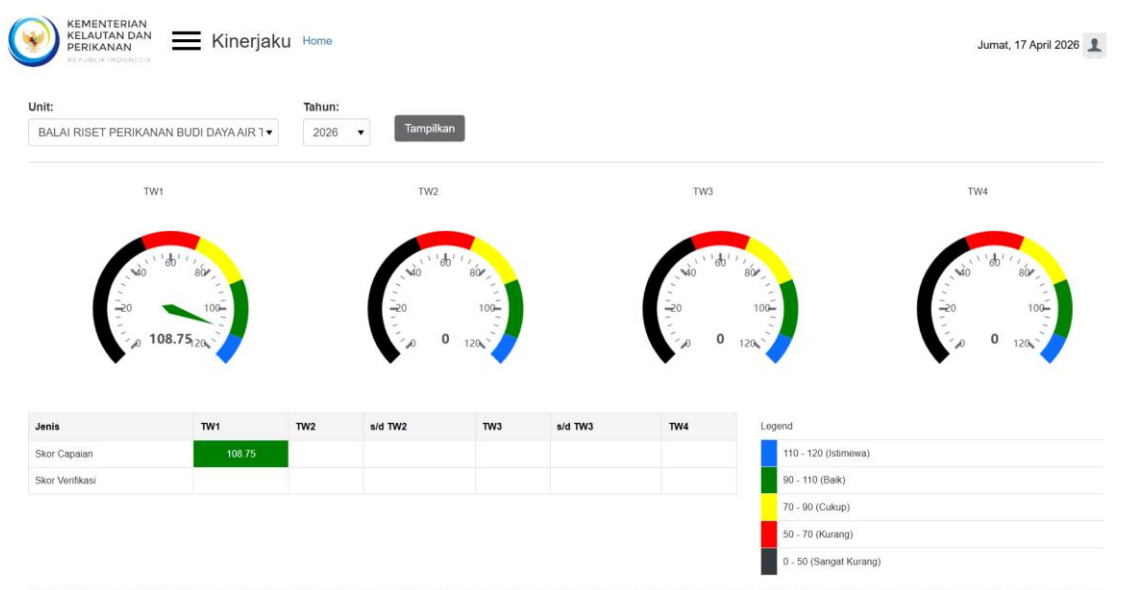
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja 7 Triwulan I Tahun 2026	54
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 8 Triwulan I Tahun 2026	56
Tabel 22. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	58
Tabel 23. Bobot Indikator IKPA	59
Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 9 Triwulan I Tahun 2026	59
Tabel 25. Kategori Nilai SAKIP	61
Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 10 Triwulan I Tahun 2026	61
Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 11 Triwulan I Tahun 2026	64
Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja 12 Triwulan I Tahun 2026	66
Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 13 Triwulan I Tahun 2026	68
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja 14 Triwulan I Tahun 2026	70
Tabel 31. Perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	71
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 15 Triwulan I Tahun 2026	72
Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 16 Triwulan I Tahun 2026	74
Tabel 34. Rekap Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	75
Tabel 35. Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	76
Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 (per jenis belanja)	77
Tabel 37. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	78
Tabel 38. Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	81
Tabel 39. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	86

Daftar Gambar

Gambar 1.	Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	vi
Gambar 2.	Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	5
Gambar 3.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Berdasarkan Jenis Jabatan Triwulan I Tahun 2026	10
Gambar 4.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan I Tahun 2026	11
Gambar 5.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Triwulan I Tahun 2026	11
Gambar 6.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Triwulan I Tahun 2026	12
Gambar 7.	Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan I Tahun 2026	12
Gambar 8.	Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	33
Gambar 9.	Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026	85

Ringkasan Eksekutif

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pendekatan *metode Logical Framework* yang menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2026 sebesar 108,75%, yang dapat dilihat pada dashboard kinerja sebagai berikut :



Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Gambar 1. Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Pada gambar dashboard capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 diatas dapat dilihat bahwa skor capaian kinerja BRPBATP pada Triwulan I masuk ke dalam kategori “Baik” yaitu dengan skor kinerja 108,75.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan I tahun 2026, dari 16 IK yang dimiliki oleh BRPBATPP, terdapat 7 IK yang memiliki target yang harus dicapai. Dari 7 IK yang harus dicapai targetnya tersebut, 3 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 4 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja. Rincian target dan realisasi dari 7 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222	1	2	200,00 atau 120% pada aplikasi kinerjaku
	2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430	50	50	100,00
	3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682	5	5	100,00
	4 Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67	5	6	120,00
	5 Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1	-	-	-
	6 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	1	-	-	-
	7 Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7	-	-	-
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86	86	86	100,00
	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan	92,1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
	Anggaran di BRPBATPP (Nilai)				
	10 Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75	-	-	-
	12 Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82	-	-	-
	13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	81	-	-	-
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77	77	100	129,87 atau 120% pada aplikasi kinerjajaku
	15 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85	-	-	-
	16 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100	100	100	100,00

Secara umum kinerja BRPBATPP tergolong baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja dengan Capaian Lebih dari 120,00% dengan Kategori Istimewa

Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120% agar tetap dipertahankan capaiannya dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.

2. Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian di akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPBATPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPBATPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai BRPBATPP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRPBATPP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Dalam rangka melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi melalui kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BRPBATPP sebagai unit pelaksana teknis dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berazaskan akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil-hasilnya dari seluruh program/kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan. Sebagai contoh pada performance keuangan yang tidak hanya sebatas mengukur seberapa besar realisasinya, tetapi bisa mengukur besarnya dana bisa mendorong seberapa besar peningkatan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, sebagai hakekat dari anggaran berbasis kinerja.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas mengacu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BRPBATPP diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;
2. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP).

Atas dasar hal-hal di atas tersebut, BRPBATPP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2026 dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2026, kemudian dituangkan ke dalam susunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan

Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Triwulan I Tahun 2026 yang dilaporkan pada akhir Triwulan I Tahun 2026 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permen KP No. 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1.2. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2026;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBATPP untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No: 74/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Dalam menjalankan tugasnya, BRPBATPP menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya air tawar di bidang perbenihan dan genetik populasi, nutrisi dan teknologi pakan, kesehatan ikan, lingkungan, toksikologi, teknologi budidaya, dan identifikasi kelayakan lahan budidaya air tawar;
3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya air tawar;
4. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
5. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan

Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Berikut adalah struktur organisasi di BRPBATPP berdasarkan Permen KP Nomor : 74/PERMEN-KP/2020.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan

Pada tahun 2026, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan memiliki 2 (dua) Tim Kerja berdasarkan Surat Tugas Kepala BRPBATPP No. B.33/BRPBATPP/KP.440/I/2026 tanggal 9 Januari 2026, yaitu: (1) Tim Kerja Manajerial bertugas menyelenggarakan dan mencapai target indikator kinerja pada kegiatan manajerial, dan (2) Tim Kerja Penyuluhan Perikanan bertugas menyelenggarakan dan mencapai target indikator kinerja pada kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan lingkup BRPBATPP.

1.4. KERAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP Nomor:74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBATPP. BRPBATPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air tawar dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang meliputi wilayah kerja sejumlah 78 kabupaten/kota di 5 Provinsi, yaitu : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor pada bulan Maret 2026 adalah sejumlah 732 orang

yang terdiri dari 724 ASN (333 PNS, 376 PPPK, 15 PPPK Paruh Waktu) dan 8 tenaga Non ASN (PJLP). Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur, Instalasi Perikanan Cijeruk, dan Instalasi Perikanan Cibalagung dan Instalasi Perikanan Depok serta wilayah kerja penyuluh perikanan yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berikut adalah jumlah pegawai BRPBATPP pada akhir bulan Maret tahun 2026 berdasarkan penempatan unit kerja yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan Penempatan Pada Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PNS	PPPK	PPPK PARUH WAKTU	PJLP	Jumlah
1.	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Sempur	30	10	1	4	45
2.	Instalasi Perikanan Cijeruk	5	9	1	2	17
3.	Instalasi Perikanan Cibalagung	6	3	1	2	12
4.	Penyuluh Perikanan (78 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta)	292	353	9	-	654
Total		333	376	15	8	732

Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Keragaan sumberdaya manusia BRPBATPP berdasarkan jabatan fungsional dan non fungsional, tingkat pendidikan, umur, golongan dan jenis kelamin pada Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Keragaan Sumberdaya Manusia BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
I.	Berdasarkan Jenis Jabatan		
1.	Kepala Balai	1	0,14
2.	Kasubbag Umum	1	0,14
3.	Instruktur	1	0,14
4.	Penyuluh Perikanan (PNS)	292	40,33
5.	Penyuluh Perikanan (PPPK)	353	48,76
6.	Pustakawan	1	0,14
7.	Perencana	2	0,28
8.	Arsiparis	2	0,28

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
9.	Analisis SDM Aparatur	3	0,41
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2	0,28
11.	Pranata Keuangan APBN	1	0,14
12.	Pranata Hubungan Masyarakat	2	0,28
13.	Fungsional Umum	25	3,45
14.	Penata Layanan Operasional	24	3,31
15.	Pengelola Layanan Operasional	4	0,55
16.	Operator Layanan Operasional	7	0,97
17.	Pengadministrasian Perkantoran	1	0,14
18.	Pengelola Umum Operasional	2	0,28
	Total	724	100,00
II.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Penyuluh		
1.	Penyuluh Perikanan Madya	43	6,83
2.	Penyuluh Perikanan Muda	149	23,65
3.	Penyuluh Perikanan Pertama	337	53,49
4.	Penyuluh Perikanan Penyelia	13	2,06
5.	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan / Mahir	25	3,97
6.	Penyuluh Perikanan Pelaksana / Terampil	63	10,00
	Total	630	100,00
III.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Instruktur		
1.	Instruktur Ahli Utama	0	0,00
2.	Instruktur Ahli Madya	0	0,00
3.	Instruktur Ahli Muda	0	0,00
4.	Instruktur Ahli Pertama	1	100,00
5.	Instruktur Penyelia	0	0,00
6.	Instruktur Mahir	0	0,00
7.	Instruktur Terampil	0	0,00
	Total	1	100,00
IV.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pustakawan		
1.	Pustakawan Utama	0	0,00
2.	Pustakawan Madya	0	0,00
3.	Pustakawan Muda	1	100,00
4.	Pustakawan Pertama	0	0,00
	Total	1	100,00
V.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Perencana		
1.	Perencana Ahli Utama	0	0,00
2.	Perencana Ahli Madya	0	0,00
3.	Perencana Ahli Muda	1	50,00

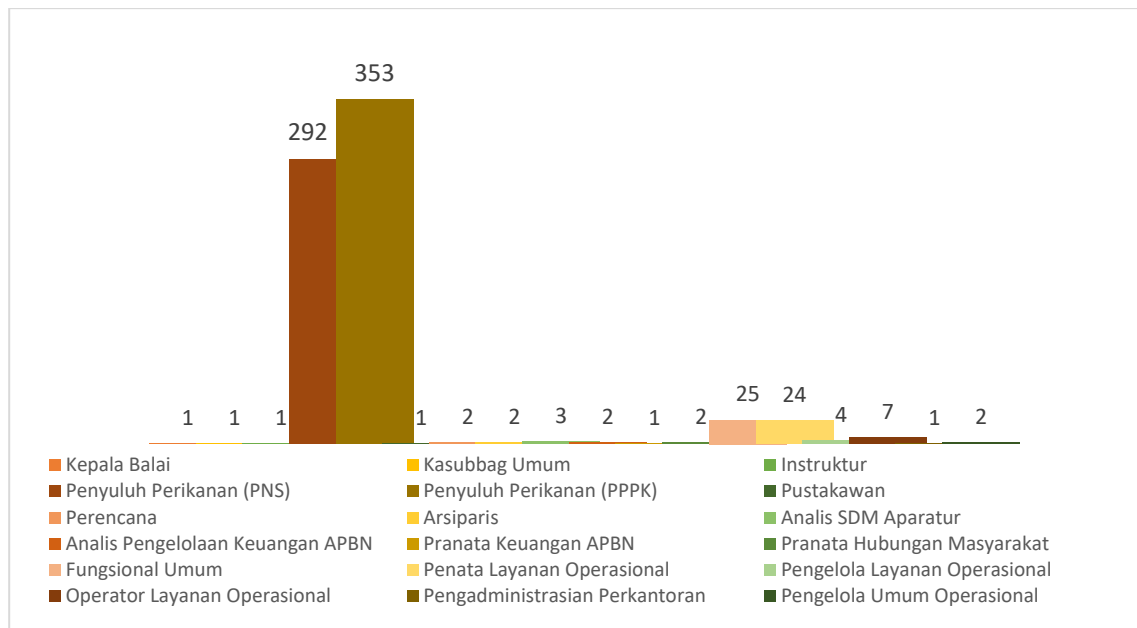
No.	Uraian	Jumlah Orang	%
4.	Perencana Ahli Pertama	1	50,00
	Total	2	100,00
VI.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Kepegawaian		
1.	Analisis SDM Aparatur Ahli Utama	0	0,00
2.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	0	0,00
3.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	33,33
4.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	2	66,67
	Total	3	100,00
VII.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Arsiparis		
1.	Arsiparis Ahli Utama	0	0,00
2.	Arsiparis Ahli Madya	0	0,00
3.	Arsiparis Ahli Muda	1	50,00
4.	Arsiparis Ahli Pertama	1	50,00
	Total	2	100,00
VIII.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN		
1.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	0	0,00
2.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	100,00
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	100,00
	Total	1	100,00
IX.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Keuangan		
1.	Pranata Keuangan Penyelia	1	50,00
2.	Pranata Keuangan Mahir	1	50,00
3.	Pranata Keuangan Terampil	0	0,00
	Total	2	100,00
X.	Berdasarkan Jenjang Fungsional Pranata Humas		
1.	Pranata Humas Madya	0	0,00
2.	Pranata Humas Muda	1	50,00
3.	Pranata Humas Pertama	1	50,00
	Total	2	100,00
XI.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
1.	S3	3	0,41
2.	S2	44	6,08
3.	S1	377	52,07
4.	D4	175	24,17
5.	D3	91	12,57
6.	SMA	31	4,28
7.	SMP	1	0,14

No.	Uraian	Jumlah Orang	%
8.	SD	2	0,28
	Total	724	100,00
XII.	Berdasarkan Golongan		
1.	Golongan I	2	0,28
2.	Golongan II	32	4,42
3.	Golongan III	252	34,81
4.	Golongan IV	49	6,77
5.	Golongan V	2	0,28
6.	Golongan IX	333	45,99
7.	Golongan VII	39	5,39
8.	PPPK Paruh Waktu	15	2,07
	Total	724	100,00
XIII.	Berdasarkan Kelompok Umur		
1.	≤25	1	0,14
2.	25 - 35 tahun	184	25,41
3.	36 – 45 tahun	377	52,07
4.	46 – 55 tahun	132	18,23
5.	≥56 tahun	22	3,04
6.	≥ 58 tahun	8	1,10
	Total	724	100,00
XIV.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	402	55,52
2.	Perempuan	322	44,48
	Total	724	100,00

Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Keragaan sumberdaya manusia di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) apabila dilihat dari tabel di atas adalah meliputi jenis jabatan, jenjang fungsional, tingkat pendidikan, golongan, umur dan jenis kelamin. Dengan melihat keragaan SDM BRPBATPP tersebut, diharapkan dapat menjadi faktor kekuatan bagi BRPBATPP untuk menjadi balai penyuluhan perikanan yang mumpuni yang dapat mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan nantinya.

Berdasarkan Tabel 3 di atas, keragaan sumberdaya manusia di BRPBATPP dapat digambarkan pada grafik dan diagram berikut ini.

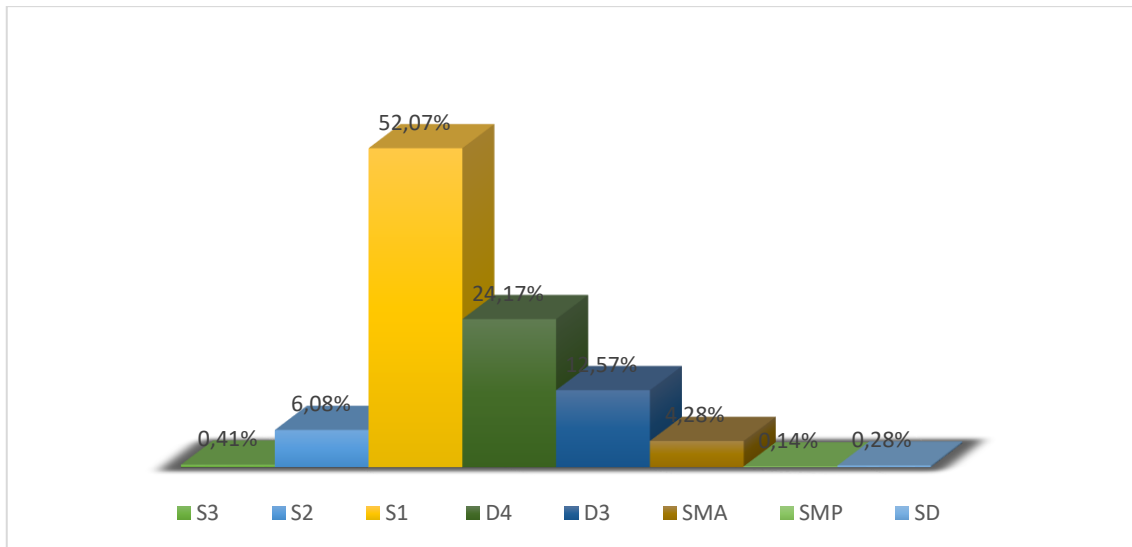


Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 3. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Berdasarkan Jenis Jabatan Triwulan I Tahun 2026

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa urutan jumlah pegawai BRPBATPP berdasarkan jenis jabatannya adalah sebagai berikut : (1) Penyuluh Perikanan (PNS sebanyak 292 orang dan PPPK sebanyak 353 orang) (2) Fungsional Umum sebanyak 25 orang, (3) Penata Layanan Operasional sebanyak 24 orang, (4) Operator Layanan Operasional sebanyak 7 orang, (5) Pengelola Layanan Operasional sebanyak 4 orang, (6) Analis SDM Aparatur sebanyak 3 orang, (7) Analis Pengelola Keuangan APBN, Perencana, Arsiparis, Pranata Hubungan Masyarakat dan Pengelola Umum Operasional masing-masing sebanyak 2 orang (9) Pustakawan, Pranata Keuangan APBN dan Pengadministrasian Perkantoran masing-masing sebanyak 1 orang.

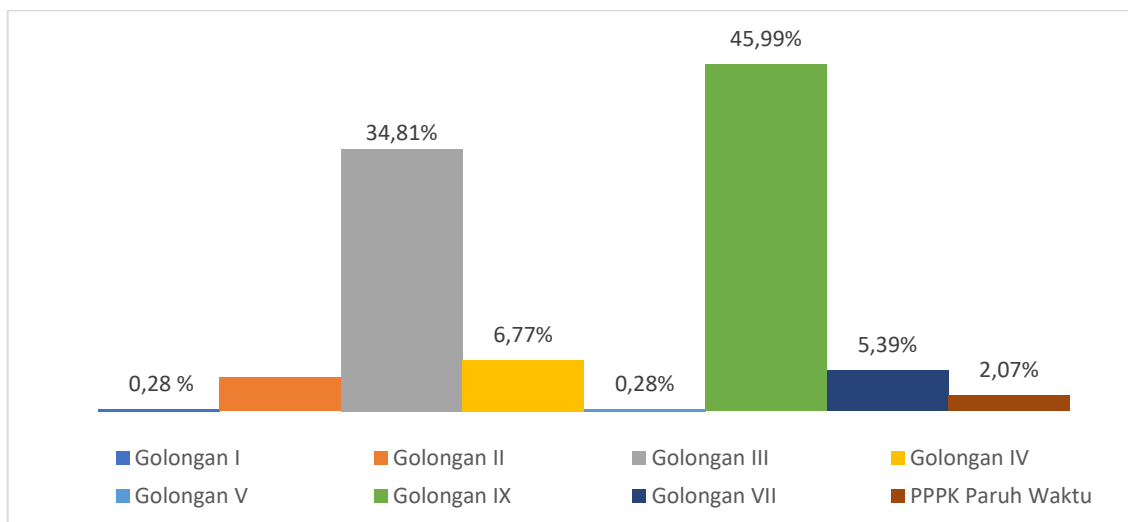
Komposisi SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : (1)Tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 377 orang (52,07%), (2)Tingkat pendidikan D4 sebanyak 175 orang (24,17%), (3)Tingkat pendidikan D3 sebanyak 91 orang (12,57%), (4) Tingkat pendidikan S2 sebanyak 44 orang (6,08%), (5) Tingkat pendidikan SMA sebanyak 31 orang (4,28%), (6)Tingkat pendidikan S3 sebanyak 3 orang (0,41%), (7)Tingkat Pendidikan SD sebanyak 2 orang (0,28%), dan (8)Tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang (0,14%). Gambaran SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.



Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 4. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan I Tahun 2026

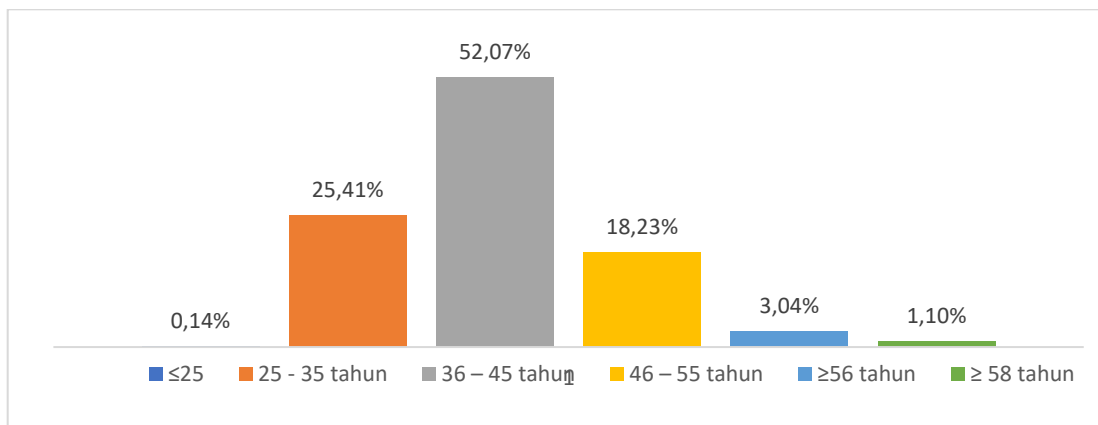
Selain keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat juga keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan golongan ruang. Golongan ruang IX mendominasi jumlah pegawai BRPBATPP yaitu sebanyak 333 orang (45,99%), diikuti oleh golongan III sebanyak 252 orang (34,81%), golongan IV sebanyak 49 orang (6,77%), golongan VII sebanyak 39 orang (5,39%), golongan II sebanyak 32 orang (4,42%), PPP Paruh Waktu sebanyak 15 orang (2,07%), golongan I sebanyak 2 orang (0,28%) dan golongan V sebanyak 2 orang (0,28%). Berikut diagram keragaan SDM berdasarkan golongan ruang sebagaimana tersaji pada Gambar 5 berikut ini.



Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 5. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Golongan Ruang Triwulan I Tahun 2026

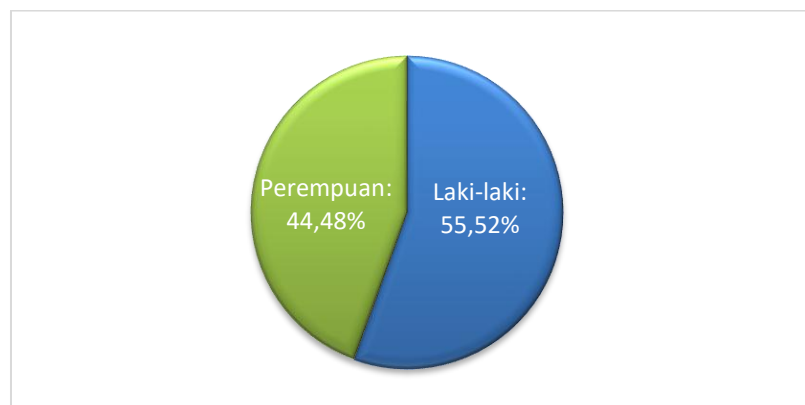
Keragaan SDM BRPBATPP dapat dilihat juga berdasarkan kelompok umur yang dibagi menjadi 6 (enam) kelompok. Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dilihat komposisi umur dengan urutan sebagai berikut: (1)Kelompok umur 36–45 tahun dengan jumlah 377 orang (52.07%), (2)Kelompok umur 25-35 tahun dengan jumlah 184 orang (25,41%), (3)Kelompok umur 46-55 tahun dengan jumlah 132 orang (18,23%), (4)Kelompok ≥56 tahun dengan jumlah 22 orang (3,04%), (5)Kelompok umur ≥58 tahun dengan jumlah 8 orang (1,10%) dan (6)kelompok ≤25 tahun dengan jumlah 1 orang (0,14%). Sebagai gambaran keragaan SDM BRPBATPP dilihat dari kelompok umur dapat dilihat pada diagram berikut ini.



Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 6. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Kelompok Umur Triwulan I Tahun 2026

Data keragaan SDM BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin juga diperlukan dalam rangka menyajikan informasi terkait kesetaraan gender di lingkup BRPBATPP. Berikut ini diagram yang menyajikan jumlah SDM yang ada di BRPBATPP berdasarkan jenis kelamin.



Sumber : diolah dari data kepegawaian BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Gambar 7. Keragaan SDM BRPBATPP Berdasarkan Jenis Kelamin Triwulan I Tahun 2026

Pada gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BRPBATPP lebih banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 402 orang (55,52%) jika dibandingkan dengan perempuan yaitu sejumlah 322 orang (44,48%). Hal ini disebabkan karena BRPBATPP merupakan balai riset perikanan dan penyuluhan sehingga lebih banyak kegiatan yang dilakukan di lapangan yang membutuhkan pegawai laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pegawai perempuan. Namun demikian, BRPBATPP tetap berupaya dalam mengikuti program pemerintah dalam melakukan penyetaraan gender dengan tetap melibatkan pegawai perempuan dalam melakukan aktivitas perkantoran maupun kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di lapangan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pegawai perempuan.

Untuk meningkatkan kualitas serta kapabilitas SDM BRPBATPP, maka balai selalu mendorong pegawainya baik yang fungsional maupun non fungsional untuk mengembangkan kemampuannya melalui tugas belajar dan ijin belajar dengan berbagai jenjang pendidikan, serta melalui diklat maupun pelatihan. Untuk kedepannya, diharapkan dengan komposisi SDM BRPBATPP tersebut dapat mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi BRPBATPP sebagai lembaga riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan.

1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2026 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan akhir Maret tahun 2026, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) pada akhir Triwulan I Tahun 2026 terhadap rencana / target kinerja (*performance plans*) pada Triwulan I Tahun 2026. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2026
- **Bab I – Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPBATPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BRPBATPP;
- **Bab II – Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi uraian singkat tentang Rencana Kerja Tahunan BRPBATPP tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.

- **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan mengenai hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- **Bab IV – Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi;
- **Lampiran**, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

1.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

BRPBATPP memiliki mandat untuk melaksanakan program riset perikanan, khususnya riset perikanan budidaya air tawar serta kegiatan penyuluhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri KP No.74 Tahun 2020. Fokus riset yang dikembangkan adalah riset pada ikan air tawar spesifik lokal potensial atau ikan-ikan asli perairan Indonesia yang memiliki potensi untuk dijadikan komoditas nasional bahkan ekspor, contohnya yaitu ikan tor, baung, gabus, gurame, tapah, udang galah dan lain-lain. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan Presiden No.33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset dan Inovasi Nasional”, sehingga BRPBATPP sudah tidak melaksanakan fungsi riset di bidang perikanan air tawar.

Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBATPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknes*) BRPBATPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) BRPBATPP. Selanjutnya dilakukan analisa SWOT yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BRPBATPP kedepannya.

Beberapa arah kebijakan BRPBATPP yang terkait kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.

2. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.
3. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
4. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak, terdengar dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (*cyber extension*); dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan mendukung program terobosan KKP melalui kegiatan penyuluhan sebagai berikut:

1. Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan kepada kelompok pelaku utama/usaha pada kawasan budidaya KP;
2. Peningkatan kemandirian melalui penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (penumbuhan kelompok, peningkatan kelas kelompok);
3. Peningkatan skala usaha pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan (UMKM dan Koperasi);
4. Peningkatan akses informasi dan teknologi, akses pasar, dan akses permodalan;
5. Peningkatan kolaborasi Penyuluhan dengan Pendidikan, Pelatihan dan Riset dalam sinergi pendidikan, pemanfaatan hasil kajiwidya, dan diseminasi hasil riset terekomendasi kepada masyarakat pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan melalui metode penyelenggaraan penyuluhan perikanan;
6. Memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya dalam hal kelembagaan.

Potensi dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan meliputi sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta anggaran yang mendukung kegiatan. Sumberdaya manusia yang mendukung BRPBATPP terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta pejabat fungsional umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan BRPBATPP sebagaimana yang disebutkan pada keragaan SDM sebelumnya.

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBATPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air tawar yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan,

perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBATPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBATPP s/d akhir Triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Aset BRPBATPP s/d Akhir Triwulan I Tahun 2026

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
A	TANAH		95.685.186.000
1	Tanah Persil (m ²)	16.345	52.488.531.000
2	Tanah Non Persil (m ²)	35.940	43.196.655.000
B	PERALATAN DAN MESIN		34.344.564.801
1	Alat Besar Darat (Unit)	3	339.040.934
2	Alat Bantu (Unit)	68	209.301.424
3	Alat Angkutan Darat Bermotor (Unit)	9	1.860.647.242
4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (Unit)	3	2.117.663
5	Alat Bengkel Bermesin (Unit)	1	981.200
6	Alat Ukur (Unit)	41	199.469.959
7	Alat Pengolahan (Unit)	341	771.834.302
8	Alat Kantor (Unit)	220	972.453.490
9	Alat Rumah Tangga (Unit)	1.969	3.896.035.737
10	Alat Studio (Unit)	25	196.202.905
11	Alat Komunikasi (Unit)	2	5.420.000
12	Peralatan Pemancar (Unit)	8	1.027.396.014
13	Alat Kedokteran (Unit)	34	1.300.038.459
14	Unit Alat Laboratorium (Unit)	577	20.636.906.373
15	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir (Unit)	22	1.011.246.633
16	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (Unit)	6	160.949.660
17	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	28	365.462.573
18	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica (Unit)	1	12.635.000
19	Laboratorium Alat Standarisasi Kalibrasi &	7	81.376.102

NO.	NAMA ASET	KUANTITAS	NILAI (RP.)
	(Unit)		
20	Komputer Unit (Unit)	72	864.263.300
21	Peralatan Komputer (Unit)	52	222.861.323
22	Alat Kerja Penerbangan (Unit)	3	27.520.000
23	Unit Peralatan Proses/Produksi (Unit)	42	180.404.508
C	GEDUNG DAN BANGUNAN		41.465.485.500
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja (Unit)	94	38.633.950.500
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Unit)	6	845.788.000
3	Tugu/Tanda Batas (Unit)	7	1.985.747.000
D	JALAN DAN JEMBATAN		381.691.000
1	Jalan (Unit)	1.887	245.882.000
2	Jembatan (Unit)	30	135.809.000
E	IRIGASI		662.585.000
1	Bangunan Air Irigasi (Unit)	17	468.489.000
2	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan (Unit)	2	32.319.000
3	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Tanah (Unit)	2	157.784.000
4	Bangunan Air Bersih/Air Baku (Unit)	1	3.993.000
F	JARINGAN		1.007.968.320
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku (Unit)	1	49.939.700
2	Instalasi Gardu Listrik (Unit)	2	328.572.170
3	Instalasi Gas (Unit)	1	5.055.000
4	Jaringan Listrik (Unit)	2	624.401.450
G	ASET TETAP LAINNYA		275.652.000
1	Bahan Perpustakaan Tercetak (Unit)	375	250.652.000
2	Alat Bercorak Kebudayaan (Unit)	1	25.000.000
H	ASET TAK BERWUJUD		126.467.500
1	Paten	2	126.467.500
TOTAL			173.949.600.121

Sumber: Data BMN BRPBATPP Per 31 Maret 2026

Anggaran untuk kegiatan BRPBATPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026. Penganggaran BRPBATPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Anggaran untuk kegiatan penyuluhan berasal dari Pusat Penyuluhan KP. Anggaran BRPBATPP pada tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Anggaran BRPBATPP Tahun 2021-2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran Tahun (Rp.000)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Belanja Pegawai	37.934.850	35.234.181	32.896.338	78.014.965	88.996.723	101.575.895
2.	Belanja Barang	15.075.908	12.960.142	18.283.910	18.008.949	10.999.315	9.984.154
3.	Belanja Modal	410.738	190.000	321.616	-	-	34.999
Total Anggaran		53.421.496	48.384.323	51.501.864	96.023.914	99.996.038	111.595.048

Sumber : Data DIPA BRPBATPP Tahun 2021-2026

Pada tahun 2021 anggaran BRPBATPP adalah sebesar Rp.57.699.654.000 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.37.934.850.000, belanja barang sebesar Rp.15.075.908.000, dan belanja modal sebesar Rp.410.738.000.

Pada tahun 2022, anggaran BRPBATPP mengalami penurunan sebesar Rp.5.037.173.000 (9,43%) yang disebabkan oleh menurunnya belanja pegawai karena berpindahnya sebagian besar peneliti dan litkayasa ke BRIN serta menurunnya belanja barang dan belanja modal. Besarnya penurunan belanja antara lain adalah belanja pegawai sebesar Rp. 2.700.669.000 (7,12%), belanja barang sebesar Rp.2.115.766.000 (14,03%), dan belanja modal sebesar Rp.220.738.000 (53,74%). Total anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.48.384.323.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp.35.234.181.000, belanja barang sebesar Rp.12.960.142.000, dan belanja modal sebesar Rp.190.000.000.

Selanjutnya pada tahun 2023, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan sebesar Rp.3.117.541.000 (6,44%) yang berasal dari peningkatan anggaran belanja barang sebesar Rp.5.323.768.000 (41,08%) serta belanja modal sebesar Rp.131.616.000 (69,27%). Sedangkan untuk belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.2.337.843.000 (6,64%). Peningkatan belanja barang pada tahun 2023 ini disebabkan oleh adanya penambahan output kegiatan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan serta adanya penambahan anggaran untuk ouput kegiatan Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan

Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Total anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp.51.501.864.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp.32.896.338.000, belanja barang sebesar Rp.18.283.910.000, dan belanja modal sebesar Rp.321.616.000.

Kemudian pada tahun 2024, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.44.522.050.000 (86,45%) yang berasal dari peningkatan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.45.118.627.000 (137,15%). Hal ini disebabkan oleh adanya pemindahan pembayaran gaji Penyuluh Perikanan BPPP Tegal ke BRPBATPP sehingga menyebabkan penambahan pagu belanja pegawai. Pada tahun 2024 ini untuk anggaran belanja barang berkurang sebesar Rp.274.961.000 (1,5%), sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2024 ini tidak ada anggaran dari Pusat. Total anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp.96.023.914.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp.78.014.965.000 dan belanja barang sebesar Rp.18.008.949.000.

Pada tahun 2025, anggaran BRPBATPP pada DIPA revisi terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp.3.972.124.000 (4,14%) yang disebabkan oleh adanya penambahan belanja pegawai sebagai dampak dari perpindahan pegawai penyuluh perikanan BPPP Tegal ke BRPBATPP Bogor. Sedangkan untuk anggaran belanja barang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp.7.009.634.000 (7,30%) sebagai dampak dari blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran belanja APBN. Total anggaran tahun 2025 adalah sebesar Rp.99.996.038.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp.88.996.723.000, dan belanja barang sebesar Rp.10.999.315.000.

Pada tahun 2026, anggaran BRPBATPP mengalami peningkatan sebesar Rp.11.599.010.000 (11,60%) yang disebabkan oleh adanya perubahan status kepegawaian bagi pegawai Non ASN (Penyuluh Perikanan Bantu, PPNP, PJLP) menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu sehingga mempengaruhi besaran belanja pegawai dan belanja barang. Besarnya penambahan belanja antara lain adalah belanja pegawai sebesar Rp. 12.579.172.000 (14,13%), dan pengurangan belanja barang sebesar Rp.1.015.161.000 (9,23%). Total anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp. 111.595.048.000 yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 101.575.895.000, belanja barang sebesar Rp. 9.984.154.000, dan belanja modal sebesar Rp.34.999.000.

Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBATPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2018–2029 diantaranya sebagai berikut:

1. Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKWISRI, KUGAR, POKMASWAS, dan KOMPAK) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
2. Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKWISRI, KUGAR, POKMASWAS, dan KOMPAK);

3. Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
4. Pembentukan, pendampingan, dan evaluasi Gapokkan/Koperasi/Korporasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
5. Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar, petambak garam, dan sebagainya);
6. Pendataan Pelaku Usaha KP (KUSUKA) dan sampling produksi (perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar dan petambak garam) dalam Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
7. Membuat rancangan model penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha/pelaku pendukung sektor KP.
8. Menyusun materi penyuluhan dan menyampaikan ke kelompok binaan.
9. Menginisiasi serta mendampingi kemitraan sektor kelautan dan perikanan.
10. Membuat inovasi teknologi hasil percontohan penyuluhan.

Sampai dengan akhir Maret 2026, jumlah penyuluh perikanan yang terdapat di BRPBATPP adalah sebanyak 654 orang yang terdiri dari 292 orang PNS, 353 orang PPPK, dan 9 orang PPPK Paruh Waktu yang tersebar di 78 Kabupaten / Kota di 5 propinsi, yaitu Propinsi Banten, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi DI Yogyakarta.

B. PERMASALAHAN

Masalah dan tantangan yang dihadapi oleh BRPBATPP dalam mendukung pembangunan KP antara lain :

- 1) Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPBATPP yang merupakan satker dibawah BPPSDM akan mengalami transformasi kelembagaan serta tugas dan fungsi.
- 2) Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- 3) Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;
- 4) Sistem monitoring terhadap penyuluh perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayah terlalu luas dengan anggaran monitoring yang kurang memadai.

BAB II. PELAKSANAAN

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2026 dengan tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi", ditetapkan sebagai panduan pembangunan nasional yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi, serta penguatan ekonomi secara berkelanjutan. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas:

1. Ketahanan pangan : mewujudkan swasembada pangan dan peningkatan produksi pangan lokal.
2. Ketahanan Energi: Mempercepat transisi energi dan kemandirian energi nasional.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program unggulan untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
4. Pendidikan Bermutu: Peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan sistem pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas: Penguatan sistem kesehatan dan akses layanan kesehatan.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: Penguatan ekonomi kerakyatan melalui dana desa dan UMKM.
7. Pertahanan Semesta: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan: Mendorong pertumbuhan ekonomi produktif

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 berfokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui swasembada pangan berbasis sumber daya akuatik (*blue food*) dan ekonomi biru, terdiri atas:

1. memperluas kawasan konservasi laut;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BRPBATPP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberadaan BRPBATPP sendiri memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dan BPPSDMKP melalui kegiatan penyuluhan perikanan sebagai berikut :

1. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat

- meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
2. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 3. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta
 4. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Salah satu kenyataan yang dihadapi pada sektor perikanan umumnya usaha perikanan didominasi oleh usaha skala kecil, tingkat pendidikan pembudidaya ikan, pengolah ikan maupun nelayan (pelaku utama) masih rendah, dan bermodal kecil. Kondisi dengan skala usaha kecil umumnya belum mampu menerapkan teknologi inovatif sehingga menjadi kurang efisien dan akan berakibat pada penurunan kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan. Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pendidikan non formal bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, BRPBATPP telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Penyuluhan KP. Kegiatan Penyuluhan KP mulai masuk ke dalam DIPA BRPBATPP pada tahun 2018. Adapun Indikator Kinerja/Output dan capaiannya untuk tahun 2020-2025 yang menjadi tanggung jawab BRPBATPP dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Penyuluhan KP BRPBATPP Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR	TARGET						CAPAIAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan	3.464	3.464	3.546	3.800	3.800	4.800	3.520	4.156	3.679	3.800	3.800	5.665
2	Percontohan Penyuluhan KP	1	1	3	-	-	-	1	1	3	-	-	-
3	Kelompok yang dinilai kelas kelompoknya	205	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	TARGET						CAPAIAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Calon kelompok pelaku utama yang disiapkan untuk ditumbuhkan menjadi kelompok pelaku utama perikanan	215	-	-	-	-	-	258	-	-	-	-	-
5	Usaha Mikro Kecil dan Koperasi Sektor KP yang dibina	576	-	-	-	-	-	580	-	-	-	-	-
6	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BRBATPP	-	75	137	130	138	248	-	81	146	148	159	250
7	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPBATPP	-	150	268	290	316	889	-	180	452	348	406	911
8.	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBATPP	-	-	1.084	889	900	-	-	-	1.106	921	933	-
9.	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di Satminkal BRPBATPP	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
10.	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP Lingkup Puslatluh KP (Desa Perikanan Cerdas) di BRPBATPP Bogor	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
11.	Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang Mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di BRPBATPP	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-
12.	Gabungan Kelompok dan/atau	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	52

NO	INDIKATOR	TARGET						CAPAIAN					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Koperasi yang mendapatkan pendampingan dari Penyuluh KP di BRPBATPP												
13.	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BRPBATPP	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
14.	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5

Sumber : 1. Renstra BRPBATPP Tahun 2020-2024, 2. Renstra BRPBATPP Tahun 2025-2029, 3. Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

A. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi BRPBATPP adalah mendukung Visi Pusat Penyuluhan KP yang berlandaskan pada Visi KKP yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan.

B. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BRPBATPP mendukung misi BPPSDMKP yang melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

C. TUJUAN

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah naungan Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 harus mampu menjalankan tujuan dari Pusat Penyuluhan KP tersebut. Tujuan yang ingin dicapai BRPBATPP selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan kesejahteraan pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
2. Membuat inovasi teknologi hasil percontohan penyuluhan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

3. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BRPBATPP.

D. SASARAN

Pada tahun 2026 ini, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebagai bentuk dukungan untuk mencapai Sasaran Strategis pada Level 0 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sasaran Program pada Level 1 BPPSDMKP, serta Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP.

Dari 5 (lima) Sasaran Strategis pada Level 0 KKP dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja, BRPBATPP mendukung 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

SS4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IK13. Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Sedangkan dari 2 (dua) Sasaran Program dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Program pada Level 1 BPPSDM, BRPBATPP mendukung 2 (dua) Sasaran Program dan 2 (dua) Indikator Kinerja Program, yaitu:

SP1. Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKP2. Persentase Peningkatan Omzet pada Kelompok Pelaku Usaha / Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya

SP2. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

IKP3. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup BPPSDM

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Laksana Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2025, dimana terdapat 5 (lima) Eselon II di lingkup BPPSDMKP, yaitu : (1) Sekretariat BPPSDMKP, (2) Pusat Penyuluhan KP, (3) Pusat Pendidikan KP, (4) Pusat Pelatihan KP, dan (5) Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan, sehingga berada dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan pada Tahun 2026 mendukung Sasaran Kegiatan pada Level 2 Pusat Penyuluhan KP. Dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan, BRPBATPP mendukung 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

SK1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Persentase Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya

IKK2. Materi dan/atau Metode Penyuluhan Terstandar yang Ditetapkan

IKK3. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

IKK4. Persentase Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi

SK4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya, BRPBATPP mendukung Sasaran Strategis Level 0, Sasaran Program Level 1, dan Sasaran Kegiatan Level 2 pada tahun 2026, melalui Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut.

SK1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKK1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)

IKK2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)

IKK3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)

IKK4. Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)

IKK5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)

IKK6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)

IKK7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)

SK2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IKK8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)

IKK9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)

IKK10. Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)

IKK11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)

IKK12. Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)

IKK13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)

IKK14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)

IKK15. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)

IKK16. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, rencana kerja BRPBATPP Tahun 2026 meliputi 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp111.595.048.000 yang terdiri dari :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp. 3.243.965.000.
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp. 108.351.083.000.

Berikut tabel yang menyajikan rencana kegiatan beserta perubahan anggaran sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2026.

Tabel 7. Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2026

No.	Program / Sasaran Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.243.965.000
	Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	3.243.965.000
2	Program Dukungan Manajemen	108.351.083.000
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	108.351.083.000
Total Anggaran BRPBATPP Tahun 2026		111.595.048.000

Sumber : DIPA dan RKAKL Awal BRPBATPP Tahun 2026

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dengan terbitnya Permen KP No.2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat perubahan susunan organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dimana terdapat 5 (lima) Eselon II di lingkup BPPSDMKP, yaitu : (1) Sekretariat BPPSDMKP, (2) Pusat Penyuluhan KP, (3) Pusat Pendidikan KP,

(4)Pusat Pelatihan KP, dan (5)Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan karena memiliki tugas pokok dan fungsi kegiatan penyuluhan, sehingga berada dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Pada tahun 2026 BRPBATPP memiliki perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP sebagai berikut.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Pusat Penyuluhan KP Tahun 2026

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682
		4	Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7
KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	92,1

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	82
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	81
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77
		15	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85
		16	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100

Sumber : Perjanjian Kinerja BRPBATPP Tahun 2026

Perjanjian kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel 8 di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi atau inisiatif strategis. Rencana aksi atau inisiatif strategis adalah kegiatan yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-KL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung jawab indikator kinerja yang dibagi oleh Kepala Balai ke ke tim kerja lingkup BRPBATPP.

Rencana aksi BRPBATPP disusun pada awal tahun atau setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan dilakukan revisi jika diperlukan. Rencana aksi berisi target output / volume dan progres fisik masing-masing kegiatan yang menjadi pendukung Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP per bulan dalam tahun 2026.

2.4. PENGUKURAN KINERJA

A. RUMUS PENGUKURAN

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing Indikator Kinerja sehingga akan diperoleh indeks capaian Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual Indikator Kinerja yang ada pada masing-masing Indikator.

Penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja perlu memperhitungkan jenis polarisasi Indikator Kinerja yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian Indikator Kinerja adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian Indikator Kinerja untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum Ada Penilaian	

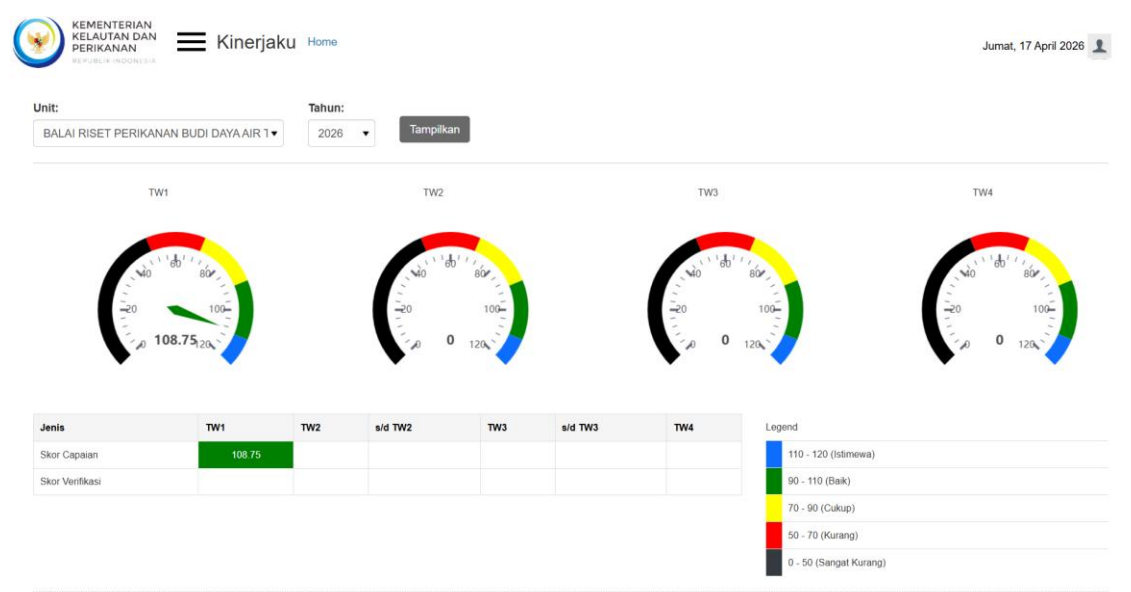
B. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPBATPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, telah ditugaskan kepada Sub-Tim Pengukuran, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi berdasarkan Surat Tugas Kepala BRPBATPP Nomor : B.184/BRPBATPP/KP.440/II/2026 tanggal 2 Februari 2026.

BAB III. HASIL PELAKSANAAN

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pendekatan *metode Logical Framework* yang menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2026 sebesar 108,75%, yang dapat dilihat pada dashboard capaian kinerja sebagai berikut :



Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Gambar 8. Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, dari 16 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja BRPBATPP, 7 diantaranya terdapat target yang harus dicapai. Selanjutnya, dari 7 Indikator Kinerja tersebut telah tercapai seluruhnya dengan rincian 3 Indikator Kinerja masuk ke dalam kategori Istimewa dengan indikator warna biru, dan 4 Indikator Kinerja masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPBATPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja (IK) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BRPBATPP yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai.

Capaian Indikator Kinerja (IK) BRPBATPP pada Sasaran Kegiatan di Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222	1	2	200,00 atau 120% pada aplikasi kinerjaku
	2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430	50	50	100,00
	3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682	5	5	100,00
	4 Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67	5	6	120,00
	5 Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1	-	-	-
	6 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di	1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TRIWULAN I		
					TARGET	REALISASI	%
			BRPBATPP (Model)				
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86	86	86	100,00
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	92,1	-	-	-
		10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75	-	-	-
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82	-	-	-
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	81	-	-	-
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77	77	100	129,87 atau 120% pada aplikasi kinerjaku
		15	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85	-	-	-
		16	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100	100	100	100,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan ini BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Kegiatan Pusluh KP yaitu “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” melalui Sasaran Kegiatan BRPBATPP “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan, dan sebagainya. Dari kegiatan penyelenggaraan penyuluhan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok yang dibina sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok pelaku usaha / pelaku pendukung yang disuluh. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama), di periode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 222 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari Indikator Kinerja ini yaitu: Triwulan I sejumlah 1 kelompok, s/d Triwulan II

sejumlah 10 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 70 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 222 kelompok.

Bukti capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor KP yang ditingkatkan kelas kemampuannya, sebagaimana format tabel pada Manual IKU yang ditentukan oleh Pusat Penyuluhan KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja 1 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
IK 1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
1	-	-	7	1	222	1	2	200,00	100	292	0,68

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP adalah sejumlah 2 kelompok (200% atau 120% pada aplikasi kinerjaku) dari target 1 kelompok.

Keragaan dari capaian kelompok yang disuluh pada Triwulan I tahun 2026 berdasarkan bidang usahanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 1 kelompok dan Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 1 kelompok, yang meningkat kelasnya dari kelas pemula menjadi kelas lanjut.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat capaian Triwulan I tahun 2021-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaiannya adalah sejumlah 1 kelompok (100,00%) dari target 1 kelompok. Pada tahun 2022-2023 tidak terdapat target serta tidak terdapat capaian pada Triwulan I, pada Triwulan I tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 7 kelompok (100,00%) dari target 7 kelompok, dan pada Triwulan I tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 1 kelompok (100,00%) dari target 1 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan sejumlah 2 kelompok (100%). Meningkatnya capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh telah terbitnya Kepmen KP No.28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompok.

Peningkatan kelas kelompok berdasarkan Kepmen KP No.28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Indikator Umum: (a) kemampuan merencanakan, (b) kemampuan mengorganisasikan, (c) kemampuan melaksanakan kegiatan, (d) kemampuan berinovasi, beradaptasi, dan kemandirian, dan (e) kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan
2. Indikator khusus: ditentukan berdasarkan karakteristik Kelompok bidang usaha atau Kelompok bidang pendukung usaha.

Selanjutnya Bobot penilaian Kelas Kemampuan Kelompok yaitu: a.60% (enam puluh persen) pemenuhan indikator umum; dan b.40% (empat puluh persen) pemenuhan indikator khusus.

Berdasarkan indikator penilaian tersebut, kemampuan kelas kelompok dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu :

1. kelas pemula, untuk Kelompok yang memperoleh nilai ≤ 250 .
2. kelas lanjut, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 250-500$.
3. kelas madya, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 500-750$.
4. kelas utama, untuk Kelompok yang memperoleh nilai $> 750-1.000$

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kelompok yang telah memperoleh Kelas Kemampuan Kelompok berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.14/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan disesuaikan sebagai berikut:

1. kelas pemula dengan perolehan nilai ≤ 250 , tetap sebagai kelas pemula.
2. kelas pemula dengan perolehan nilai >250 sampai dengan 350, disesuaikan sebagai kelas lanjut.

3. kelas madya dengan perolehan nilai >350 sampai dengan 650, tetap sebagai kelas madya.
4. kelas utama dengan perolehan nilai >650 sampai dengan 1000, tetap sebagai kelas utama.

Pada Tabel 10 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2029 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 0,68%. Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok antara lain melakukan penyuluhan serta melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Kelompok yang telah dilakukan penilaian telah memenuhi kriteria untuk dapat dinaikkan kelasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SimpelKP2 sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan kinerja penyuluh perikanan.
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui kegiatan : (a) pembinaan kinerja penyuluh perikanan dan evaluasi capaian kinerja penyuluh perikanan baik yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, serta (c) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPBATPP.
3. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui : (a) laporan mingguan dan triwulan, (b) pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP.
4. Memasukkan ke dalam SKP penyuluh perikanan dengan target sesuai dengan jenjang jabatannya

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 2.014.152.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.477.603.710 (23,71%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini sebesar 120%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 96,29%.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP.

Tabel 11. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	%
1.	BRPBATPP Bogor	1	2	200,00
2.	BRPPUPP Palembang	1	1	100,00
3.	BBRBLPP Gondol	1	1	100,00
4.	BRPBAPPP Maros	5	6	120,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase capaian satker lainnya. Untuk kedepannya, capaian Indikator Kinerja ini perlu dipertahankan kinerjanya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh pada tahun 2026 oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan meliputi: fasilitasi akses informasi, akses teknologi terekomendasi dan/atau tepat guna, akses pasar, akses permodalan, dan akses perizinan berusaha dan/atau

manajemen mutu. Pelaksanaan penyuluhan terhadap pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Setiap kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung yang telah disuluh wajib dibuatkan profil kelompoknya, mengacu pada Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 6.430 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari Indikator Kinerja ini yaitu: Triwulan I sejumlah 50 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 2.700 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 4.700 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 6.430 kelompok.

Bukti capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh oleh penyuluh perikanan, sebagaimana format tabel pada Manual IKU yang ditentukan oleh Pusat Penyuluhan KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 2 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan												
IK 2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
2.681	405	552	500	56	6.430	50	50	100,00	-10,71	5.954	0,84	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP adalah sejumlah 50 kelompok (100,00%) dari target 50 kelompok.

Keragaan dari capaian kelompok yang disuluh pada Triwulan I tahun 2026 berdasarkan bidang usahanya terdiri dari: (1)Kelompok Usaha Bersama (KUB) berjumlah 7 kelompok, (2)Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 35 kelompok, dan (3)Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 8 kelompok. Sedangkan capaian kelompok berdasarkan kelas kelompoknya terdiri dari: (1)Kelompok Pemula berjumlah 29 kelompok, (2)Kelompok Lanjutan berjumlah 13 kelompok, dan (3)Kelompok Madya berjumlah 8 kelompok.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat capaian Triwulan I tahun 2021-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaiannya adalah sejumlah 2.681 (107,24%) dari target 2.500 kelompok. Pada tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 405 kelompok (101,25%) dari target 400 kelompok, pada tahun 2023 capaiannya adalah sejumlah 552 kelompok (120,00%) dari target 460 kelompok, pada tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 500 kelompok (100,00%) dari target 500 kelompok, dan pada tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 56 kelompok (106,00%) dari target 50 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini mengalami penurunan sejumlah 6 kelompok (10,71%). Menurunnya capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh:

1. Terjadi perubahan pedoman penyusunan Prprofil Kelompok yang semula mengacu pada Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 berubah menjadi mengacu pada Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, sehingga penyuluh memerlukan waktu untuk penyesuaian format penyusunan profil.
2. Masih terdapat profil kelompok yang diupload oleh penyuluh perikanan yang belum sesuai dengan ketentuan atau format yang diminta sehingga tidak dapat dijadikan data dukung untuk Indikator Kinerja tersebut,
3. Aplikasi SimpelKP2 sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan kinerja penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP, masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.

Pada Tabel 12 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2029 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 0,84%.

Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP dapat mencapai target pada Triwulan I tahun 2026 ini antara lain adalah:

1. Penyuluh Perikanan melakukan kegiatan pendampingan terhadap kelompok yang menjadi salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjangnya;
2. Telah disusunnya manual IKI Penyuluh Kelautan dan Perikanan oleh Pusluh KP yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Penyuluh telah menyusun / mengupdate profil kelompok sebagai data dukung untuk Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SimpelKP2 sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan kinerja penyuluh perikanan
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui kegiatan : (a) pembinaan kinerja penyuluh perikanan dan evaluasi capaian kinerja penyuluh perikanan baik yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, serta (c) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPBATPP
3. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui : (a) laporan mingguan dan triwulan, (b) pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP
4. Memasukkan ke dalam SKP penyuluh perikanan dengan target sesuai dengan jenjang jabatannya

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 2.014.152.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.477.603.710 (23,71%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase

capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 76,29% terhadap pagu.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP.

Tabel 13. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	%
1.	BRPBATPP Bogor	50	50	100,00
2.	BRPPUPP Palembang	100	120	120,00
3.	BBRBLPP Gondol	100	120	120,00
4.	BRPBAPPP Maros	500	600	120,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP paling rendah jika dibandingkan dengan persentase capaian satker lainnya. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan yang dibuktikan Surat Pengesahan Pembentukan Kelompok. Pembentukan kelompok mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran capaian Indikator Kinerja ini adalah melalui penghitungan jumlah kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah diIndikator Kinerja kuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 682 kelompok. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari Indikator Kinerja ini yaitu: Triwulan I sejumlah 5 kelompok, s/d Triwulan II sejumlah 145 kelompok, s/d Triwulan III sejumlah 295 kelompok, dan s/d Triwulan IV sejumlah 682 kelompok.

Bukti capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah data kelompok pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang dibentuk, sebagaimana format tabel pada Manual IKU yang ditentukan oleh Pusat Penyuluhan KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja 3 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
IK 3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
94	55	103	70	12	682	5	5	100,00	-58,33	585	0,85

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP adalah sejumlah 5 kelompok (100,00%) dari target 5 kelompok.

Keragaan dari capaian kelompok yang dibentuk pada Triwulan I tahun 2026 berdasarkan bidang usahanya terdiri dari Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) berjumlah 4 kelompok, dan Kelompok Pengolah Pemasar (Poklahsar) berjumlah 1 kelompok.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat capaian Triwulan I tahun 2021-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaiannya adalah sejumlah 94 (117,50%) dari target 80 kelompok. Pada tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 55 kelompok (110,00%) dari target 50 kelompok, pada tahun 2023 capaiannya adalah sejumlah 103 kelompok (114,44%) dari target 90 kelompok, pada tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 70 kelompok (100,00%) dari target 70 kelompok, dan pada tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 12 kelompok (120,00%) dari target 10 kelompok.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini mengalami penurunan sejumlah 7 kelompok (-58,33%). Menurunnya capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh aplikasi SimpelKP2 sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan kinerja penyuluh perikanan lingkup BRPBATPP, masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan.

Pada Tabel 14 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2025 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 0,85%.

Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP dapat mencapai target pada Triwulan I tahun 2026 ini antara lain adalah:

1. Pembentukan kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya;
2. Banyak potensi di wilayah binaan yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SimpelKP2 sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan kinerja penyuluh perikanan
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui kegiatan : (a) pembinaan kinerja penyuluh perikanan dan evaluasi capaian kinerja penyuluh perikanan baik yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP, serta (c) kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPBATPP

3. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui : (a) laporan mingguan dan triwulan, (b) pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP
4. Memasukkan ke dalam SKP penyuluh perikanan dengan target sesuai dengan jenjang jabatannya

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 2.014.152.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.477.603.710 (23,71%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 76,29% terhadap pagu.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kinerja Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kinerja Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP.

Tabel 15. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	%
1.	BRPBATPP Bogor	5	5	100,00
2.	BRPPUPP Palembang	5	7	140,00
3.	BBRBLPP Gondol	10	12	120,00
4.	BRPBAPPP Maros	15	19	126,67

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Kinerja Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP paling rendah jika dibandingkan dengan persentase capaian satker lainnya. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 4. Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang dibuktikan dengan Surat Pengesahan Gapokkan/ Akta Kopdeskel Merah Putih.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan.

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 67 unit. Sedangkan target akumulatif per triwulan dari Indikator Kinerja ini yaitu: Triwulan I sejumlah 5 unit, s/d Triwulan II sejumlah 30 unit, s/d Triwulan III sejumlah 45 unit, dan s/d Triwulan IV sejumlah 67 unit.

Bukti capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah data Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang didampingi oleh Penyuluh Perikanan, sebagaimana format tabel pada Manual IKU yang ditentukan oleh Pusat Penyuluhan KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 4 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
IK 4. Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025					Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	-	1	67	5	6	120,00	0	67	8,96

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP adalah sejumlah 6 unit (120,00%) dari target 5 unit.

Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2025 ini. Pada tahun 2021-2024, target Indikator Kinerja ini belum ada. Pada tahun 2025 capaiannya adalah sejumlah 2 unit (200% atau 120% pada aplikasi kinerja) dari target 1 unit.

Pada Tabel 16 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2029 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 8,96%.

Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 dapat melampaui target antara lain adalah:

1. Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang tertuang di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya sesuai dengan jenjang jabatannya.
2. Profil Gapokkan/Koperasi/Korporasi telah disusun / diupdate oleh Penyuluh Perikanan sesuai format berdasarkan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 319 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Profil Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui kegiatan: (a) pembinaan kinerja penyuluh perikanan dan evaluasi capaian kinerja penyuluh perikanan baik yang dilaksanakan secara luring di wilayah kerja penyuluh perikanan maupun daring melalui zoom meeting, (b) laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP.
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui: (a) laporan mingguan dan triwulan, (b) pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP.
3. Memasukkan ke dalam SKP penyuluh perikanan dengan target sesuai dengan jenjang jabatannya.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden dengan pagu sebesar Rp. 1.520.679.000 dan realisasi sebesar Rp.0 (0,00%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar 120,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120,00% terhadap pagu.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP.

Tabel 17. Perbandingan Persentase Capaian Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (Unit)	Realisasi (Unit)	%
1.	BRPBATPP Bogor	5	6	120,00
2.	BRPPUPP Palembang	1	2	200,00 atau 120,00 pada aplikasi kinerjaku
3.	BBRBLPP Gondol	1	1	100,00
4.	BRPBAPPP Maros	20	24	120,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP sama tinggi jika dibandingkan dengan persentase capaian satker lainnya. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat dipertahankan sehingga target sampai dengan akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja 5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)

Media Penyuluhan adalah adalah segala jenis alat bantu, sarana, atau perantara yang digunakan oleh penyuluh untuk menyampaikan pesan, informasi, atau

teknologi kepada masyarakat KP secara lebih efektif, jelas, dan menarik. Media Penyuluhan terdiri dari materi (1) pengembangan sumber daya manusia; (2) peningkatan modal sosial budaya; (3) ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) informasi; (5) ekonomi; (6) manajemen; (7) hukum; dan/atau (8) pelestarian lingkungan.

Media Penyuluhan dapat berupa media terdengar, media cetak, media tertayang dan/atau media sosial. Satu paket media penyuluhan minimal tersusun dari dua materi wajib (teknologi dan pelestarian lingkungan), dan diperbolehkan jika memuat materi selain dua materi tersebut.

Sumber materi penyuluhan terstandar yang akan disusun menjadi media penyuluhan dapat diakses pada laman *Knowledge Management System* (KMS) Materi Penyuluhan KP (<https://sites.google.com/view/pelaksanaan-penyuluhan-kp/beranda>) dan sumber data/informasi lain yang valid dari unit kerja lingkup KKP dan/atau dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Penyusunan Media Penyuluhan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala BRSDM KP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Pemanfaatan Materi dan Media Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Daring

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah media penyuluhan yang disusun oleh BRPBATPP. Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 1 paket. Bukti capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah media penyuluhan dalam bentuk *softcopy*/ file dan/atau link Youtube.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja 5 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan												
IK 5. Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)												
Realisasi TW I					Tahun 2026						Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025- 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP karena target di akhir tahun. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp.34.999.000 dan tidak ada realisasi pada Triwulan I. Efisiensi anggaran baik terhadap pagu tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasi anggaran maupun capaian IK.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target di akhir tahun 2026 antara lain adalah:

1. Identifikasi media penyuluhan terstandar sesuai kebutuhan penyuluh perikanan (14 judul)
2. Penyusunan draft/rancangan materi penyuluhan (Link akses <https://drive.google.com/drive/folders/1CRLwlmHZQ9xaoc8zfReaVe4snoJQYOqJ?usp=sharing>)
3. Melakukan cascading IKU balai ke SKP pegawai, yaitu ke tim kerja penyuluhan dan penyuluh perikanan

Indikator Kinerja 6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)

Kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui penerapan teknologi terekomendasi dan/atau teknologi tepat guna, termasuk penerapan metode dan praktik usaha yang telah terbukti keberhasilannya yang diharapkan dapat diadopsi dan diterapkan oleh pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan mengacu pada Petunjuk Teknis Percontohan Penyuluhan yang berlaku.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah kegiatan percontohan penyuluhan yang telah diterapkan kepada pelaku usaha dan/atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 1 paket. Bukti capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah Laporan pelaksanaan kegiatan Percontohan Penyuluhan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja 6 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan											
IK 6. Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2026 ini. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp. 118.420.000 dan tidak ada realisasi pada Triwulan I. Efisiensi anggaran baik terhadap pagu tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasi anggaran maupun capaian IK

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target di akhir tahun 2026 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan proposal kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB) Percontohan Penyuluhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
2. Melakukan cascading IKU balai ke SKP pegawai, yaitu ke tim kerja penyuluhan dan penyuluh perikanan

Indikator Kinerja 7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti dan lulus penilaian kompetensi sesuai dengan

persyaratan yang berlaku, serta memperoleh sertifikat kelulusan dari Biro SDMAO KKP.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah dengan menghitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh *Assesment Center* KKP. Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Target sampai dengan akhir tahun adalah sejumlah 7 orang.

Bukti capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah : Surat usulan pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi dari Kepala UPT/Satminkal Penyuluhan KP kepada Pejabat Berwenang, dilampiri data Penyuluh Perikanan yang lulus Uji Kompetensi dilengkapi dengan link Sertifikat dan/atau Surat Keterangan dari Biro SDMAO KKP, sebagaimana format tabel pada Manual IKU yang ditentukan oleh Pusat Penyuluhan KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja 7 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan												
IK 7. Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025- 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP karena target di akhir tahun. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan dengan pagu sebesar Rp.51.002.000 dan tidak ada realisasi pada Triwulan I. Efisiensi anggaran baik terhadap pagu tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasi anggaran maupun capaian IK.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Melakukan seleksi dan membuat rekapan nama penyuluh perikanan yang akan mengIndikator Kinerja ti penilaian kompetensi di lingkup BRPBATPP
2. Membuat Nota Dinas perihal Usulan Penilaian Kompetensi Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Bidang Penyuluhan Perikanan Tahun 2026 dari Kepala BRPBATPP yang ditujukan kepada Kepala Pusluh KP dengan nomor 64/BRPBATPP/KP.930/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026 dan susulan melalui Nota Dinas nomor 325/BPPSDM.2/KP.930/III/2026 tanggal 10 Maret 2026. Pada surat ini jumlah penyuluh perikanan yang diusulkan adalah sejumlah 25 Orang.

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Pada sasaran kegiatan ini, BRPBATPP berperan serta dalam mendukung Sasaran Kegiatan Pusat Penyuluhan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” melalui sasaran kegiatan BRPBATPP “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”. Adapun capaian tersebut dapat diraih dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja yang mendukungnya yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)

Definisi dari indikator ini adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BRPBATPP sampai dengan waktu pengukuran.

Pengukuran indicator kinerja ini adalah dengan melakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BRPBATPP}} \times 100\%$$

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu: Triwulan I sebesar 86,00%, s/d Triwulan II sebesar 86,00%,

s/d Triwulan III sebesar 86,00%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 86,00%. Target Indikator Kinerja ini pada akhir tahun adalah sebesar 86,00%.

Bukti capaian dari Indikator Kinerja ini adalah berupa Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%) pada Triwulan I tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja 8 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	75	82	100	86	86	86	100,00	-14,00	89	96,63

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP adalah sebesar 86,00% (100,00%) dari target 86,00%.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja ini mulai ada di tahun 2023. Capaian Triwulan I tahun 2023-2025 terus mengalami perubahan. Pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 75,00% (100,00%) dari target 75,00%, pada tahun 2024 capaiannya adalah sebesar 80,00% (100,00%) dari target 80,00%, dan pada tahun 2025 capaiannya adalah sebesar 100,00% (117,65%) dari target 85,00%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini mengalami penurunan sebesar 14,00% (14,00%). Menurunnya capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2025 antara lain disebabkan oleh tidak adanya uji petik yang dilakukan oleh Itjen KKP melalui kegiatan evaluasi maupun pemantauan pada periode Triwulan IV tahun 2025 (bulan Oktober sampai dengan Desember 2025) sehingga tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh BRPBATPP. UPT yang tidak ada temuan atau tindaklanjutnya telah tuntas sebelum pengukuran triwulan I, maka capaian IKU nya adalah 100% (capaian sama dengan target).

Data dukung Indikator Kinerja ini untuk Triwulan I tahun 2026 adalah berupa Nota Dinas Sekretaris BPPSDM No.1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP”.

Pada Tabel 21 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2029 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 96,63%.

Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di BRPBATPP telah mencapai target, yaitu antara lain adalah:

1. Tidak ada kegaitan pengawasan oleh Itjen selama periode Triwulan IV TA 2025 s.d. Triwulan I TA 2026 dan rekomendasi Itjen KKP dari pengawasan sebelumnya telah ditindaklanjutinya seluruhnya oleh BRPBATPP dan/atau telah ditindaklanjutinya rekomendasi Itjen KKP oleh BRPBATPP.
2. Telah dilakukan koordinasi dengan Itjen KKP terkait rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau Berita Acara Tindak Lanjut kegiatan evaluasi, pemantauan maupun audit yang dilaksanakan di BRPBATPP.
3. Telah dilaksanakan koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPPSDMKP terkait aplikasi SIDAK yang memuat progress tindak lanjut rekomendasi dari Itjen KKP.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Membuat rekap rekomendasi Itjen KKP beserta berita acara tindak lanjut.
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP.
3. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui kegiatan pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP.
4. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait dengan pemantauan dokumen tindak lanjut.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) dengan pagu sebesar Rp. 3.620.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.1.200.000 (33,15% terhadap pagu). Jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 66,85% terhadap pagu.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di BRPBATPP.

Tabel 22. Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	BRPBATPP Bogor	86	86	100,00
2.	BRPPUPP Palembang	86	86	100,00
3.	BBRBLPP Gondol	86	86	100,00
4.	BRPBAPPP Maros	86	86	100,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di BRPBATPP memiliki persentase capaian yang sama dengan semua satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP, karena tidak dilakukan uji petik oleh Itjen KKP sehingga capaian sesuai dengan target. Untuk kedepannya, capaian untuk Indikator Kinerja ini perlu dipertahankan agar dapat mencapai target atau melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran Indikator Kinerja ini melalui formulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

1. Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.

- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Tabel 23. Bobot Indikator IKPA

No.	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1.	Revisi DIPA	10
2.	Deviasi RPD	15
3.	Penyerapan Anggaran	20
4.	Belanja Kontraktual	10
5.	Penyelesaian Tagihan	10
6.	Pengelolaan UP dan TUP	10
7.	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
8.	Capaian Output	25

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah semesteran. Target pada Semester 1 adalah sebesar 83 sedangkan target pada Semester 2 adalah sebesar 92,10. Bukti akhir capaian Indikator Kinerja ini adalah berupa Nota Dinas Biro Keuangan.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 9 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	-	-	92,10	-	-	-	-	92,25	-

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBATPP karena target semesteran. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026.

Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal dengan pagu sebesar Rp.3.320.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.450.000 (13,55%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar 0,00%, maka efisiensi anggaran belum dapat dihitung secara akurat berdasarkan realisasi anggaran yang telah ada.

Meskipun Nilai IKPA tersedia setiap bulan pada aplikasi MyIntress, namun nilai IKPA pada akhir bulan Maret belum merupakan nilai akhir yang diambil sebagai nilai capaian akhir Indikator Kinerja ini. Diharapkan pada akhir Triwulan IV nanti, nilai IKPA dapat tercapai sesuai dengan aspek dan indikator yang menjadi kriteria perhitungan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IKPA di akhir tahun 2026, antara lain adalah:

1. Melakukan monitoring terhadap indikator penilaian pada IKPA setiap bulan di aplikasi MyIntress
2. Berkoordinasi dengan operator SAKTI untuk pengisian capaian output pada Modul Komitmen sesuai dengan data dukung yang tersedia
3. Berkoordinasi dengan operator SAKTI terkait revisi anggaran dan halaman III DIPA pada Modul penganggaran
4. Memasukkan Indikator Kinerja IKPA ke dalam SKP pegawai BRPBATPP yang terkait dengan pengukuran nilai IKPA.

Indikator Kinerja 10. Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)

Definisi dari Indikator Kinerja ini adalah Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perhitungan Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian dirilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Penilaian Mandiri SAKIP Level III lingkup BPPSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BPPSDM. Kategori nilai PM SAKIP Level III lingkup BPPSDM yaitu dapat dilihat pada tabel Berikutini.

Tabel 25. Kategori Nilai SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : Permen PAN & RB Tahun 2021

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Target Indikator Kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 81,2. Bukti capaian dari Indikator Kinerja ini adalah Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP dari Sekretariat BPPSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai) pada Triwulan I Tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 10 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 10. Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	81,2	-	-	-	-	81,80	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BRPBATPP karena target di akhir tahun. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) dengan pagu sebesar Rp.4.000.000 dan tidak ada realisasi pada Triwulan I. Efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasi anggaran.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja ini di akhir tahun antara lain adalah:

1. Melengkapi dokumen perencanaan, pelaporan, serta evaluasi yang akan digunakan untuk penilaian mandiri SAKIP.
2. Melakukan updating serta mengunggah dokumen SAKIP pada <https://esr.menpan.go.id>.
3. Menindaklanjuti rekomendasi pada laporan kinerja, evaluasi rencana aksi, maupun rekomendasi dari Itjen KKP

Indikator Kinerja II. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : (a) Sangat Baik, apabila NKPA > 90; (b) Baik, apabila NKPA >80 - 90; (c) Cukup, apabila NKPA >60 - 80; (d) Kurang, apabila NKPA >50 – 60; (e) Sangat Kurang, apabila NKPA ≤ 50.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah melalui penghitungan NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Sumber : Manual IKU BRPBATPP Tahun 2026

1. Efektivitas

a. Capaian RO

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

CRO : Capaian RO Tingkat Satker

RVROi : Realisasi Volume Roi

TVROi : Target Volume Roi

n : Jumlah RO

2. Efisiensi

a. Penggunaan SBK

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

b. Efisiensi SBK

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

E_{SBK} : Efisiensi SBK Tingkat Satuan Kerja

Indeks SBKi : Indeks SBK RO I sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA SBKi : Indeks Realisasi RO I SBK

n : Jumlah RO SBK

Formula perhitungan NKPA Satker adalah sebagai Berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times W_{penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan :

NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK

NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi

W_{CRO} : Bobot Capaian RO

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Target Indikator Kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 71,75. Bukti capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah: Nota Dinas dari Biro Keuangan, Setjen KKP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai) Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27. Capaian Indikator Kinerja 11 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	71,75	-	-	-	-	72,50	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP karena target di akhir tahun. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp.6.251.601.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.023.171.660 (16,37%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar 0,00%, maka efisiensi anggaran belum dapat dihitung secara akurat berdasarkan realisasi anggaran yang telah ada.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target IK ini di akhir tahun antara lain adalah:

1. Monitoring capaian NKPA setiap bulan melalui aplikasi Monev Keuangan, monitoring pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI
2. Melaksanakan koordinasi dengan operator SAKTI internal BRPBATPP pada modul komitmen terkait pengisian capaian output yang berpengaruh pada nilai CRO pada aplikasi Monev Kemenkeu
3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait dengan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI

Indikator Kinerja 12. Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)

Definisi dari Indikator Kinerja ini meliputi:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah dengan cara menghitung indeks profesionalitas ASN dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

1. Dimensi Kualifikasi memiliki bobot 25%, nilai dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
2. Dimensi Kompetensi memiliki bobot 40%, nilai diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat kompetensi yang dilakukan pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN;
3. Dimensi Kinerja memiliki bobot 30%, nilai diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat kinerja pada SIASN BKN; dan

4. Dimensi Disiplin memiliki bobot 5%, nilai diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematid sebagai berikut :

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$\text{IP ASN Unit Organisasi} = \frac{\text{Total Nilai IP ASN Seluruh pegawai ASN Unit Organisasi}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi}}$$

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah per semester. Target IP ASN sampai dengan akhir tahun 2026 adalah telah ditetapkan sebesar 82. Sedangkan target per semester adalah: Semester 1 adalah 72, dan semester 2 adalah 82. Bukti dukung capaian akhir dari Indikator Kinerja ini adalah Nota Dinas Biro SDMAO atau Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP (Indeks) Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Capaian Indikator Kinerja 12 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 12. Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Nilai)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	83	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026 ini tidak terdapat target untuk Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BRPBATPP karena target semesteran. Demikian juga pada Triwulan I Tahun 2021 sampai dengan 2025 juga tidak terdapat realisasi sehingga belum dapat dibandingkan persentase capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Manajemen SDM dengan pagu sebesar Rp.1.640.000 dan tidak ada realisasi pada Triwulan I. Efisiensi anggaran tidak dapat dihitung karena tidak ada realisasi anggaran.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Melakukan pemutakhiran riwayat kompetensi yang dilakukan pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN.
2. Himbauan *updating* data kepegawaian melalui aplikasi myASN BKN kepada pegawai BRPBATPP melalui media apel pagi maupun rapat koordinasi lainnya.
3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait penetapan target indikator IP ASN ke dalam SKP pegawai lingkup BRPBATPP yang harus dicapai oleh pegawai.

Indikator Kinerja 13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%)

- d. penyusutan arsip (25%)
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Indikator Kinerja ini adalah Indikator Kinerja baru pada tahun 2026. Target Indikator Kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 71. Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Bukti capaian dari Indikator Kinerja ini adalah Surat/Nota Dinas Biro Umum, Setjen KKP.

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 13 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
IK 13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)											
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029	
2021-2025											
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	72,50	-

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2026. Pada tahun 2021-2025, target Indikator Kinerja ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal dengan pagu sebesar Rp.2.640.000 dan telah terealisasi sebesar Rp300.000,- (11,36%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar 0,00%, maka efisiensi anggaran belum dapat dihitung secara akurat berdasarkan realisasi anggaran yang telah ada.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Penataan arsip digital (klasifikasi & pemberkasan) pada Portal KKP.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan sosialisasi kearsipan.

3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait penetapan target indikator IP ASN ke dalam SKP pegawai lingkup BRPBATPP yang harus dicapai oleh pegawai.

Indikator Kinerja 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP.

Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formulasi perhitungannya adalah sebagai Berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Target sampai dengan akhir tahun adalah sebesar 77%. Sedangkan target per triwulan dari Indikator Kinerja ini yaitu: Triwulan I sebesar 77%, Triwulan II sebesar 77%, Triwulan III sebesar 77%, dan Triwulan IV sebesar 77%. Bukti capaian untuk Indikator Kinerja ini adalah Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ.

Capaian Indikator Kinerja (IK) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja 14 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025					Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
2021	2022	2023	2024	2025								
-	-	-	-	100	77	77	100	129,87 atau 120 pada aplikasi kinerjaku	-	80	125,00	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP adalah sebesar 100,00% (129,87%) dari target 77,00%.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja ini mulai ada di tahun 2025. Pada Triwulan I tahun 2025 capaiannya adalah sebesar 100,00% (125,00%) dari target 80,00%. Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini adalah tetap yaitu tidak terjadi penurunan maupun kenaikan. Hal ini disebabkan oleh RUP yang diumumkan unit kerja sesuai dengan pagu pengadaan baik pada Triwulan I tahun 2025 maupun tahun 2026.

Data dukung Indikator Kinerja ini untuk Triwulan I tahun 2026 adalah berupa Nota Dinas Sekretaris BPPSDM No.1428/BPPSDM.1/PL.410/IV/2026 tanggal 13 April 2026 perihal Capaian IKU "Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026".

Pada Tabel 30 diatas, dapat dilihat juga persentase capaian Triwulan I dibandingkan dengan target BRPBATPP pada tahun 2029 dimana persentase capaiannya adalah sebesar 125,00%.

Faktor pendukung yang menyebabkan Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP telah melampaui target, yaitu antara lain adalah Nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan barang / jasa BRPBATPP tahun 2026 sehingga tidak ada selisih pagu.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Melakukan input data pengadaan, koreksi data dan mengumumkan RUP di aplikasi SiRUP
2. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat BPPSDM dan Biro Umum & PBJ KKP terkait dengan efisiensi anggaran dan klarifikasi belanja PBJ
3. Tugas sebagai operator SIRUP dengan output berupa RUP BRPBATPP dimasukkan sebagai indikator kinerja individu pada SKP.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Umum dengan pagu sebesar Rp. 8.160.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.1.450.000 (17,77%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini sebesar 120,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 102,23% terhadap pagu.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP.

Tabel 31. Perbandingan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Satker	Target (%)	Realisasi (%)	%
1.	BRPBATPP Bogor	77	100	129,87
2.	BRPPUPP Palembang	77	100	129,87
3.	BBRBLPP Gondol	77	100	129,87
4.	BRPBAPPP Maros	77	100	129,87

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian terhadap target Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP memiliki persentase capaian yang sama dengan semua satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Untuk kedepannya, capaian untuk Indikator Kinerja ini perlu dipertahankan agar dapat mencapai target atau melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Indikator Kinerja 15. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP merupakan Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Berdasarkan Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021, penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebagai berikut:

- Memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40;
- Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit;
- Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang bersih dan akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,5;
- Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja ini adalah berdasarkan hasil penilaian melalui LKE SAQ (Self Assessment Quesioner) Tim Penilai Internal BPPSDM KP.

Indikator Kinerja ini adalah Indikator Kinerja baru pada tahun 2026. Target Indikator Kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 85. Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah tahunan. Bukti capaian dari Indikator Kinerja ini adalah *Screenshot* dari Aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik).

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja 15 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 15. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	86,50	-	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP merupakan Indikator Kinerja baru pada tahun 2026. Pada tahun 2021-2025, target Indikator Kinerja ini belum ada sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan dengan target BRPBATPP tahun 2029 juga belum dapat dilakukan karena belum terdapat capaian pada Triwulan I tahun 2026.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal dengan pagu sebesar Rp.4.920.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.500.000,- (30,49%). Namun demikian, jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah sebesar 0,00%, maka efisiensi anggaran belum dapat dihitung secara akurat berdasarkan realisasi anggaran yang telah ada.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Presentasi Uji Publik
2. Penghargaan Monev KIP Lingkup KKP Tahun 2025
3. Penandatanganan Komitmen Bersama
4. Pembinaan Petugas Layanan
5. Penyampaian dokumen kelembagaan PPID permintaan PPID es 1
6. Pelaksanaan layanan informasi Publik pada 20 pemohon informasi
7. Pemutakhiran daftar informasi Publik pada website PPID BRPBATPP
8. Publikasi Layanan informasi Publik pada medsos Balai
9. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Informasi Publik BRPBATPP periode Semester II Tahun 2025.

Indikator Kinerja 16. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

Pengukuran Indikator Kinerja ini adalah melalui penghitungan :

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

1. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

2. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (ditandatangani) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

Periode pelaporan untuk Indikator Kinerja ini adalah triwulanan. Rincian target untuk per triwulan yaitu: Triwulan I sebesar 100,00%, s/d Triwulan II sebesar 100,00%, s/d Triwulan III sebesar 100,00%, dan s/d Triwulan IV adalah sebesar 100,00%. Target Indikator Kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah 100,00%.

Bukti capaian dari Indikator Kinerja ini adalah Dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker dapat berupa laporan, matrik, *screen shoot* aplikasi yang ditandatangani Pimpinan Satker.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%) pada Triwulan I Tahun 2026 ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 16 Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan												
IK 16. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)												
Realisasi TW I					Tahun 2026					Target BRPBATPP 2025-2029		
2021-2025												
2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan TW I 2025-2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029	
25	29	19	100	100	100	100	100	100,00	-	100	100,00	

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Pada Triwulan I tahun 2026 ini, capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP adalah sebesar 100,00% (100,00%) dari target 100,00%.

Selain itu, pada tabel diatas dapat dilihat capaian Triwulan I tahun 2021-2025 dimana capaiannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaiannya adalah sebesar 25,00% (100,00%) dari target 25,00%. Pada tahun 2022 capaiannya adalah sebesar 29,41% (100,00%) dari target 29,41%, pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 18,52% (100,00%) dari target 18,52%, pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 capaiannya adalah sebesar 100,00% (100,00%) dari target 100,00%.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2025, maka capaian pada Triwulan I tahun 2026 untuk Indikator Kinerja ini persentase capaiannya adalah tetap yaitu tidak terjadi penurunan maupun kenaikan. Hal ini disebabkan oleh

tercapainya seluruh target dokumen yang harus disediakan sebagai data dukung baik pada Triwulan I tahun 2025 maupun tahun 2026.

Tabel 34. Rekap Dokumen Pendukung Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	Nama Dokumen	Target	Realisasi	%
1	Rekapitulasi data penilaian kinerja dan penilaian perilaku pegawai	2	2	100,00
2	Laporan Realisasi PNB	3	3	100,00
3	Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Tahun 2025	1	1	100,00
5	Laporan e-monev Bappenas (Triwulan 4 TA 2025)	1	1	100,00
6	Laporan bulanan BRPBATPP (Bulan Januari-Maret 2026)	3	3	100,00
7	Evaluasi Rencana Aksi (Triwulan IV Tahun 2025)	1	1	100,00
8	Laporan publikasi bulanan (Bulan Januari-Maret 2026)	3	3	100,00
9	SOP Penyelenggaraan Penyuluhan	1	1	100,00
10	Laporan bulanan Lingkup Layanan Penyuluhan (Bulan Januari-Maret 2026)	3	3	100,00
11	Laporan triwulanan Lingkup Layanan Penyuluhan (Triwulan I Tahun 2026)	1	1	100,00
Jumlah Dokumen		19	19	100,00

Sumber : Data Rincian Dokumen Bukti Dukung INDIKATOR KINERJA Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Hal yang menjadi faktor tercapainya target Indikator Kinerja ini adalah telah tersedianya dokumen pendukung Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP sejumlah 19 dokumen dan tercapai 19 dokumen pada Triwulan I.

Kegiatan dilakukan sebagai penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini antara lain adalah:

1. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBATPP melalui laporan mingguan dan bulanan internal BRPBATPP
2. Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui kegiatan pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBATPP dengan Kepala Pusluh KP,
3. Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait dokumen pendukung Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja ini adalah anggaran Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp.101.575.895.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.25.106.928.408 (24,72%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100,00%, maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 75,28%. Capaian Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan satker lainnya karena merupakan Indikator Kinerja yang hanya ada di BRPBATPP Bogor dan capaiannya didukung oleh seluruh pegawai lingkup BRPBATPP Bogor terutama untuk kegiatan yang terkait administrasi.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, rencana kerja BRPBATPP Tahun 2025 meliputi 2 (dua) program dengan pagu anggaran awal adalah Rp.86.107.571.000 yang terdiri dari:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran awal Rp.3.739.252.000,.
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran awal Rp.107.855.796.000,.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan revisi terhadap DIPA BRPBATPP sebanyak 3 kali, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 35. Revisi DIPA BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

No.	DIPA	Tanggal Terbit DIPA / Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
1.	Awal	01 Desember 2025	111.595.048.000	-
2.	Revisi ke 01	31 Desember 2025	111.595.048.000	Revisi dalam rangka tindak lanjut Surat Menteri Keuangan RI No.S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 hal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.
3.	Revisi ke 02	12 Februari 2026	111.595.048.000	Revisi Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data POK
4.	Revisi ke 03	02 Maret 2026	111.669.148.000	Revisi dalam rangka buka blokir kode 2 dan Penambahan Pagu PNPB

Sumber: DIPA dan RKAKL BRPBATPP Tahun 2026

Capaian realisasi anggaran BRPBATPP pada Triwulan I tahun 2026 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 36. Pagu dan Realisasi Anggaran BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 (per jenis belanja)

No.	Sumber Dana		Belanja Pegawai (Rp.)	Belanja Barang (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Rupiah Murni	Pagu (Rp.)	101.575.895.000	9.984.154.000	34.999.000	111,595,048,000
		Realisasi (Rp)	25.106.928.408	1.505.675.370	0	26.612.603.778
		%	24,72	15,08	0	23,83
2.	PNBP	Pagu (Rp.)	0	0	0	0
		Realisasi (Rp)	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
	Total Anggaran	Pagu (Rp.)	101.575.895.000	9.984.154.000	34.999.000	111,595,048,000
		Realisasi (Rp)	25.106.928.408	1.505.675.370	0	26.612.603.778
		%	24,72	15,10	0	23,85

Sumber : Aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di Triwulan I tahun 2026, maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPBATPP di Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN PENDUKUNG RKAKL	ANGGARAN		
		TARGET	CAPAIAN	%		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% THD PAGU
I.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					3.739.252.000	477.603.710	12,77%
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	1	2	200,00% atau 120,00% pada kinerjaku	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	2.014.152.000	477.603.710	23,71%
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	50	50	100,00%				23,71%
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	5	5	100,00%				23,71%
4	Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	5	6	120,00%	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1.520.679.000	0	0,00%
5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	0	0	0,00%	Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	34.999.000	0	0,00%
6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	0	0	0,00%	Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	118.420.000	0	0,00%
7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	0	0	0,00%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	51.002.000	0	0,00%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN PENDUKUNG RKAKL	ANGGARAN		
		TARGET	CAPAIAN	%		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% THD PAGU
II.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					107.855.796.000	26.135.000.068	24,23%
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86	86	100,00%	Layanan BMN untuk Satker Vertikal	3.620.000	1.200.000	33,15%
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal	3.320.000	450.000	13,55%
10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal	4.000.000	0	0,00%
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Perkantoran	6.251.601.000	1.023.171.660	16,37%
12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	0	0	0,00%	Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT	1.640.000	0	0,00%
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal	2.640.000	300.000	11,36%
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77	100,00	129,87% atau 120,00% pada kinerjaku	Layanan Umum	8.160.000	1.450.000	17,77%
15	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal	4.920.000	1.500.000	30,49%
16	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100,00	100,00	100,00%	Layanan Perkantoran	101.575.895.000	25.106.928.408	24,72%
						111.595.048.000	26.612.603.778	23,85%

Sumber : Aplikasi MyIntressKementerian Keuangan, Laporan realisasi anggaran pada aplikasi SAKTI, dan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan, yaitu: ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dan tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi anggaran, data yang dibutuhkan meliputi: target kinerja, capaian kinerja, persentase capaian kinerja, pagu anggaran, realisasi anggaran, dan persentase anggaran.

Efisiensi anggaran dihitung dengan cara menghitung selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran. Semakin besar persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase anggaran, maka akan semakin besar nilai efisiensinya.

Tabel 38. Capaian Efisiensi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN PENDUKUNG RKAKL	ANGGARAN			EFISIENSI THD PAGU
		TARGET	CAPAIAN	%		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% THD PAGU	
I.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan					3.739.252.000	477.603.710	12,77%	52,69%
1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	1	2	120,00%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	2.014.152.000	477.603.710	23,71%	96,29%
2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	50	50	100,00%				23,71%	76,29%
3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	5	5	100,00%				23,71%	76,29%
4	Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	5	6	120,00%	Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	1.520.679.000	0	0,00%	120,00%
5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	0	0	0,00%	Peralatan dan Mesin Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	34.999.000	0	0,00%	0,00%
6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	0	0	0,00%	Percontohan Penyuluhan/Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang Diterapkan kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan	118.420.000	0	0,00%	0,00%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN PENDUKUNG RKAKL	ANGGARAN			EFISIENSI THD PAGU
		TARGET	CAPAIAN	%		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% THD PAGU	
7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	0	0	0,00%	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	51.002.000	0	0,00%	0,00%
II.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan					107.855.796.000	26.135.000.068	24,23%	19,18%
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86	86	100,00%	Layanan BMN untuk Satker Vertikal	3.620.000	1.200.000	33,15%	66,85%
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal	3.320.000	450.000	13,55%	-13,55%
10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal	4.000.000	0	0,00%	0,00%
11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Perkantoran	6.251.601.000	1.023.171.660	16,37%	-16,37%
12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	0	0	0,00%	Layanan Manajemen SDM lingkup Kementerian/Lembaga tanpa Satker Vertikal di Daerah dan Tanpa UPT	1.640.000	0	0,00%	0,00%
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan untuk Satker Vertikal	2.640.000	300.000	11,36%	-11,36%
14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77	100,00	120,00%	Layanan Umum	8.160.000	1.450.000	17,77%	102,23%

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR KINERJA			KEGIATAN PENDUKUNG RKAKL	ANGGARAN			EFISIENSI THD PAGU
		TARGET	CAPAIAN	%		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% THD PAGU	
15	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	0	0	0,00%	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi untuk Satker Vertikal	4.920.000	1.500.000	30,49%	-30,49%
16	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100,00	100,00	100,00%	Layanan Perkantoran	101.575.895.000	25.106.928.408	24,72%	75,28%
						111.595.048.000	26.612.603.778	23,85%	35,94%

Sumber : Aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan, Laporan realisasi anggaran pada aplikasi SAKTI, dan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>

Keterangan :

Data diolah dari sumber aplikasi MyIntress, SAKTI dan SAPK

*Untuk persentase capaian yang lebih dari 120,00% perhitungan efisiensi nya menggunakan realisasi batas maksimal pada aplikasi kinerjaku yaitu 120,00%

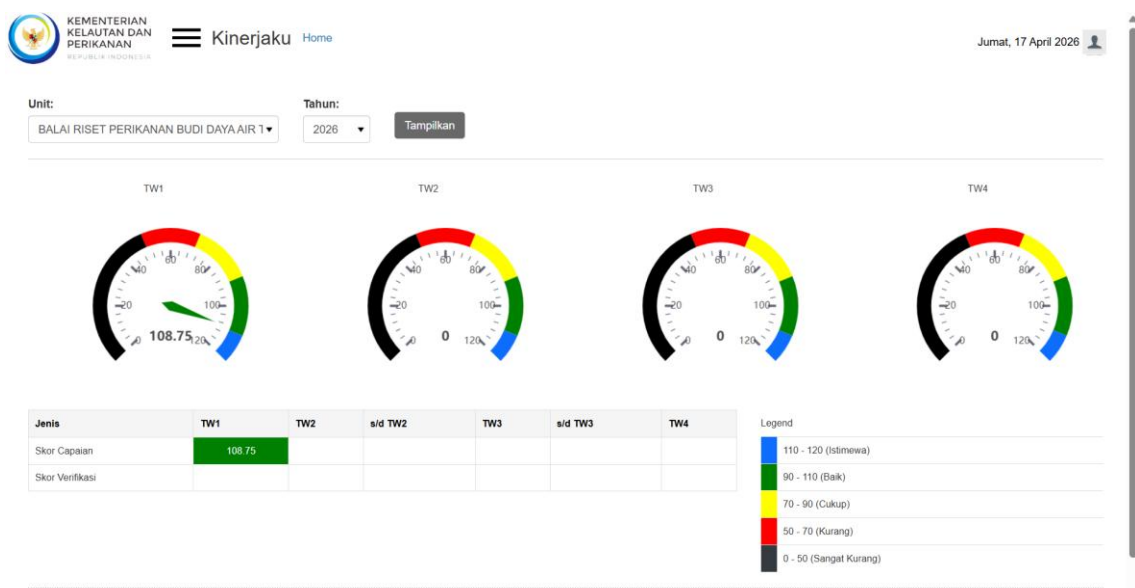
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai kinerja organisasi BRPBATPP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 108,75% sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 23,85% berdasarkan pagu awal. Nilai kinerja menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 35,94%. Angka efisiensi tersebut didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja. Nilai efisiensi tersebut menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan anggaran pada Triwulan I tahun 2026 tersebut tingkat efisiensi anggaran BRPBATPP masuk dalam kategori baik, yang dapat dilihat dari nilai efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level plus. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran pada posisi 23,85% dengan tingkat output kegiatan mencapai 108,75%.
2. Terdapat beberapa indikator kinerja dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 110%, seperti:
 - a. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP dari target 1 kelompok tercapai 2 kelompok;
 - b. Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP dari target 5 unit tercapai 6 unit;
 - c. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP dari target 77% tercapai 100%.

BAB IV. PENUTUP

4.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pendekatan *metode Logical Framework* yang menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <https://kinerjaku.kkp.go.id/>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBATPP pada akhir Triwulan I Tahun 2026 yang dapat dilihat pada dashboard kinerja sebagai berikut :



Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

Pada gambar dashboard capaian kinerja BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026 diatas dapat dilihat bahwa skor capaian kinerja BRPBATP pada Triwulan I masuk ke dalam kategori Baik yaitu dengan skor kinerja 108,75.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan BRPBATPP di akhir Triwulan I tahun 2026, dari 16 IK yang dimiliki oleh BRPBATPP, terdapat 7 IK yang memiliki target yang harus dicapai. Dari 7 IK yang harus dicapai targetnya tersebut, 3 IK masuk ke dalam kategori istimewa dengan indikator warna biru karena telah melampaui target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja, dan 4 IK masuk ke dalam kategori baik dengan indikator warna hijau karena telah mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja. Rincian target dan realisasi dari 7 Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Capaian Kinerja Lingkup BRPBATPP Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222	1	2	200,00 atau 120% pada aplikasi kinerjaku
	2 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430	50	50	100,00
	3 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682	5	5	100,00
	4 Gabungan kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67	5	6	120,00
	5 Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1	-	-	-
	6 Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	1	-	-	-
	7 Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7	-	-	-
2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86	86	86	100,00
	9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di	92,1	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
	BRPBATPP (Nilai)				
	10 Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	82	-	-	-
	11 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75	-	-	-
	12 Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82	-	-	-
	13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	81	-	-	-
	14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77	77	100	129,87 atau 120% pada aplikasi kinerjaaku
	15 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85	-	-	-
	16 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100	100	100	100,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2026

4.2. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja BRPBATPP tergolong baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja dengan Capaian Lebih dari 120,00% dengan Kategori Istimewa

Indikator kinerja dengan capaian lebih dari 120% agar tetap dipertahankan capaiannya dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.

2. Verifikasi dan Validasi Capaian Kinerja

Indikator Kinerja yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatannya. Penanggung jawab indikator kinerja agar memastikan bahwa capaian di akhir tahun dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPBATPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBATPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBATPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPBATPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan
Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani



Ditandatangani
Secara Elektronik

R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBATPP (Kelompok)	222
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBATPP (Kelompok)	6.430
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBATPP (Kelompok)	682
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BRPBATPP (Unit)	67
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BRPBATPP (Paket)	1
		6	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan di BRPBATPP (Model)	1
		7	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBATPP (Orang)	7
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di BRPBATPP (%)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	92,1
		10	Penilaian Mandiri SAKIP di BRPBATPP (Nilai)	81,2
		11	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di BRPBATPP (Nilai)	71,75
		12	Indeks Profesionalitas ASN di BRPBATPP (Indeks)	82
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di BRPBATPP (Nilai)	71

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di BRPBATPP (%)	77
		15	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BRPBATPP (Nilai)	85
		16	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPBATPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Rp. 3.243.965.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Rp. 108.351.083.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan		Rp. 111.595.048.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya
Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

R.R. Sri Pudji Sinarni Dewi